

PEMBANGUNAN JEMBATAN PULAU BENGKALIS – BUKIT BATU MASUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/122531/2025/04/22/pembangunan-jembatan-siak-v-pekanbaru-kembali-digaungkan-masuk-psn-20252030#sthash.HJ537Y3M.dpbs>

Pembangunan jembatan Siak V yang akan menjadi penghubung strategis antara Jalan Lingkar Dalam Kota dengan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai kembali digaungkan.

Bahkan, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut bahwa jika jembatan Siak V jadi terhubung, maka Pekanbaru akan semakin maju dan nilai investasi akan semakin tinggi.

"Saya sudah sampaikan ke Gubernur. Saya juga sampaikan bahwa saya sudah memasukkan jalan depan kantor Walikota ke ujung masuk ke proyek strategis nasional (PSN). Ini akan menghubungkan jalan lingkar dalam dengan Okura dan menuju tol Pekanbaru - Dumai. Kita yakin PSN ini 2025 - 2030 kita akan dapat, kita terus melobi itu," papar Agung kepada [CAKAPLAH.com](https://www.cakaplah.com), Selasa (22/4/2025).

Ia menyebut, bahwa berkaca dari jembatan Siak IV, ketika sudah dibangun dan dimanfaatkan nilai investasi semakin terbuka.

"Ini jembatan Siak V kalau dibuka tak ada sekatan lagi antara Pekanbaru kota dan Rumbai, makanya kita kolaborasi dengan pemprov dan pemerintah pusat," cakupnya.

Disinggung mengenai kewenangan pembangunan jembatan Siak V merupakan kewenangan dari pemerintah kota, provinsi ataupun pusat, menurut Agung sebenarnya menjadi kewenangan pemilik anggaran saja.

"Kewenangan jembatan Siak V ini sebenarnya yang punya anggaran saja, jadi kalau kita punya anggaran kita masukkan, kalau provinsi bisa provinsi, kalau pusat kita akan lobi. Kalau APBD kota Pekanbaru kita paham sendiri kondisi hari ini defisit. Maka kami sedang susun untuk bayar utang-utang dulu. Untuk jembatan Siak V ini, kita akan lobi terus (pemprov dan Pusat)," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/122531/2025/04/22/pembangunan-jembatan-siak-v-pekanbaru-kembali-digaungkan-masuk-psn-20252030#sthash.HJ537Y3M.dpbs>, Pembangunan Jembatan Siak V Pekanbaru Kembali Digaungkan, Masuk PSN 2025-2030, 22/4/2025;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/533073/pembangunan-jembatan-siak-v-pekanbaru-kembali-digaungkan-masuk-psn-2025-2030>, Pembangunan Jembatan Siak V Pekanbaru Kembali Digaungkan, Masuk PSN 2025-2030, 22/4/2025;

Catatan:

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan atau non-anggaran Pemerintah.

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya:

- a. tidak memungut; atau
 - b. mengenakan tarif 0% (nol persen),
- bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.

Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden tentang percepatan Proyek Strategis Nasional. Perizinan dan nonperizinan diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu:

- a. Penetapan Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
- d. Izin Mendirikan Bangunan.

Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan perizinan diatas.

Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau. Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau.

Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati. Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.